

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

David Easton, *A Systems Analysis of Political Life*, (New York: John Wiley & Sons, 1965).

Dian Purwanto, *Implementasi Hukum Pertanahan dalam Era Digitalisasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2023).

Direktorat Infrastruktur dan Teknologi Informasi, *Laporan Implementasi Sertipikat Elektronik oleh Kementerian ATR/BPN* (Jakarta: Kementerian ATR/BPN, 2021).

Gustav Radbruch, "*Legal Philosophy*," dalam *The Legal Philosophies of Lask, Radbruch, and Dabin*, (Harvard University Press, 1950).

Jimly Asshiddiqie, *Hukum dan Teknologi Informasi di Era Digital* (Jakarta: Prenada Media, 2020).

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, *Digitalisasi Pertanahan: Mewujudkan Sistem Pertanahan Modern* (Jakarta: Kementerian ATR/BPN, 2021).

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017).

Maria SW Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, (Yogyakarta: FH UGM, 2008).

Max Weber, *Economy and Society*, (Berkeley: University of California Press, 1978).

Moch Isnaeni, *Hukum Jaminan Kebendaan* (Yogyakarta: LaksBang PRESSindo).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017).

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005).

_____, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987).

Purnomo, S., *Implementasi Sertipikat Elektronik dalam Sistem Pertanahan Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Buku Pertanahan, 2022).

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 2004).

Rahayu, D., *Sertipikat Elektronik dan Masalah Ketidaklengkapan Data: Tinjauan Hukum*, (Jakarta: Penerbit Hukum Indonesia, 2023).

Salim, HS., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Cet. 7* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010).

Sudikno M., *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar* (Yogyakarta : Liberty, 1986).

_____, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2001).

Journal International/Jurnal Nasional:

Ahmad Fauzi, "Kepastian Hukum dalam Digitalisasi Sertipikat Tanah di Indonesia", *Jurnal Digitalisasi dan Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2023.

Arie S. “Hutagalung, Status Sertipikat Elektronik dan Aspek Hukumnya”,
Jurnal Hukum Pertanahan Digital, Vol. 3 No. 1 2022.

Gunanegara dan Sherly M. Surya, “Kejahatan pendaftaran tanah oleh (oknum)
pejabat ATR/BPN di wilayah polda metro jaya ditinjau dari hukum
administrasi pemerintahan dan hukum pidana”, Researchgate. July,
2022. DOI: 10.13140/RG.2.2.29712.07684/1

Haryanto, T., “*Analisis Implementasi Sertipikat Elektronik di Indonesia*”,
Jurnal Hukum Agraria, Vol. 15, 2022.

Ni Kadek Wina Surya Adiyanti dan Ida Bagus Anggapurana Pidada, “Peran
Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Penerbitan Sertifikat Tanah
Elektronik”, Student Research Journal, Vol. 2, 2024. DOI:
<https://doi.org/10.55606/srjyappi.v2i4.1421>.

Qonita Rizkiana dan Widhi Handoko, “Eksistensi Sertifikat Elektronik
Terhadap UU Cipta Kerja Dalam Menjamin Kepastian Hukum”,
Notarius, Vol. 16, 2023. DOI:
<https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41632>.

Syahrul, M., “*Infrastruktur Teknologi Informasi dalam Administrasi
Pertanahan*”, Jurnal Teknologi Pertanahan, Vol. 5, No. 3, 2022.

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat
Elektronik.

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan
Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Wawancara:

Hasil wawancara dengan Fransiska Lilis Harja, Notaris dan PPAT daerah kerja Kabupaten Bekasi, Kantor Notaris, Cikarang, Tanggal 5 Mei 2025 Pukul 13.00 wib.

Hasil wawancara dengan Sri Pranoto, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara, Jakarta, Tanggal 10 Mei 2025 Pukul 15.00 wib.